

Menggagas Kampung Ikan Madong Jadi Kawasan Minawisata Bahari Berbasis Perikanan Budidaya



Oleh:
DR MUZAHAR

Dosen Prodi BDP dan Magister Ilmu Lingkungan UMRH

KAMPUNG Madong dijadikan *Pilot Project* Kampung Ikan di Tanjungpinang, oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada 15 Desember 2021 lalu. Saat itu, Wali Kota Tanjungpinang Rahma sempat berdialog dengan *stakeholder* terkait. Adapun tawar dialog, yakni, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Kampung Ikan Madong, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan menumbuhkan daya saing.

Kampung Madong diproyeksikan, menjadi salah satu daerah pengembangan potensi perikanan secara maksimal. Sehingga, menjadi sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya seperti pariwisata. Program menjadikan Madong sebagai kampung ikan, sejalan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Apakah yang dimaksud dengan kampung ikan? Kampung ikan adalah suatu istilah dari program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menetapkan suatu daerah (desa, kelurahan, kampung), sebagai kawasan penggerak ekonomi wilayah berbasis potensi perikanan (air tawar dan laut) daerah tersebut.

Program ini bertujuan, untuk peningkatan ekonomi lokal di perdesaan. Pemilihan komoditas ikan unggulan lokal, merupakan hal penting sebagai penggerak ekonomi desa melalui peningkatan usaha perikanan.

Harapan dari terlaksananya program ini, terwujudnya pengembangan kampung ikan yang sesuai potensinya. Sehingga, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, tercipta lapangan pekerjaan, dan berdampak positif bagi perekonomian regional daerahnya. Setelah program Kampung Ikan Madong sudah diluncurkan oleh Pemko Tanjungpinang, selanjutnya yang jadi pertanyaan, program dan kegiatan apa yang akan dikerjakan? Dan kapan direalisasikan?

Semua itu layak untuk dicermati, dan diberikan kontribusi positif sebagai bagian peran serta aktif warga Tanjungpinang. Dalam rangka, membangkitkan ekonomi, dan kesejahteraan warga Tanjungpinang tercinta.

Tulisan kecil ini dimaksudkan, sebagai sumbang gagasan, dalam menstimulus perwujudan kampung ikan tersebut, dilihat dari letak geografis dan demografis Kampung Madong, Kota Tanjungpinang.

Penulis optimis, program Kampung Ikan Madong akan tumbuh dan berkembang.

Kegiatan ini niscaya akan berlangsung dengan baik, bila, potensi perikanan Kampung Madong dioptimalkan dan dimanfaatkan.

Kedua, keunggulan spesifik lokasinya, seperti potensi hamparan hutan *mangrove* yang rimbun, hijau, asri dikelola secara terpadu dan maksimal, disertai inovasi dilakukan dengan memanfaatkan *Internet of Things (IoT)*, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan ketersediaan sumber daya manusia. Sebelum menyampaikan gagasan tersebut, saya mengajak para pembaca yang budiman, untuk mengenal secara dekat Kampung Madong. Kampung Madong secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang.

Kampung ini berbatasan dengan Kampung Sungai Nyirih dan Kelurahan Air Raja, Kota Tanjungpinang serta dengan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan.

Antara Kampung Madong dan Kampung Sungai Nyirih, dipisahkan oleh laut yang menjorok ke darat sehingga dapat dikategorikan sebagai teluk.

"Teluk Madong" adalah muara dari dari Sungai Nyirih. Perairan laut Teluk Madong ini merupakan wilayah lalu lintas kapal dagang, yang bersandar di Dermaga rakyat di hulu Sungai Nyirih, sekitar batu 16 arah jalan baru lintas barat di Toapaya Selatan Bintan. Penduduk Kampung Madong umumnya adalah suku Melayu. Dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya, adalah nelayan tangkap tradisional, dan pembudidaya ikan. Jenis ikan dalam arti luas yang banyak ditangkap oleh nelayan di kampung ini beraneka ragam. Seperti ikan lebam, belanak, baronang, kitang, sembilang, bilis atau teri, udang, siput gonggong, rajungan, teripang.

Ikan-ikan yang dibudidayakan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA), adalah ikan kerapu cantang, kerapu lumpur, kakap putih, ikan merah, bawal bintang. Jadi, warga masyarakat Kampung Madong sudah akrab dengan dunia perikanan.

Bagaimana dan apa aktivitas kaum ibu di Kampung Madong? Mereka membentuk kelompok pengolahan kerupuk ikan tamban. Ada juga yang berprofesi nelayan, penangkap siput gonggong, dan udang, serta pembuat minyak gamat dari teripang. Pemasarannya bahkan sudah sampai ke Surabaya, Jawa Timur dan Singapura.

Kampung Madong dikarunia oleh Allah SWT, dengan banyak potensi perikanan. Yang sampai saat ini, tetap lestari karena

dimanfaatkan secara bijak.

Beberapa potensi dimaksud antara lain, hamparan hutan *mangrove*, dengan banyak jenis tanaman dengan bentuk yang indah, dan eksotik di sepanjang sisi pesisir dari mulai hulu Sungai Nyirih sampai ke muara Teluk Madong.

Lalu, hamparan padang lamun (*sea grass*), dengan kerapatan tinggi dan luas tempat hidup dan mencari makan (*nursery ground*) ikan-ikan, siput gonggong, udang, teripang dan aneka biota laut lainnya.

Potensi ini sangat baik dijadikan eduwisata dan ekowisata, untuk para siswa di Tanjungpinang. Beraneka ragam biota laut yang hidup di Teluk Madong, seperti ikan lebam, siput gonggong, teripang dan jenis lainnya. Selanjutnya, perairan laut Kampung Madong tergolong belum tercemar, dengan kedalaman dan kecepatan arus dalam kisaran batas memenuhi syarat. Sehingga, layak dan sesuai untuk budidaya ikan dengan sistem KJA.

Nilai kadar garam (salinitas) di Teluk Madong, tergolong payau sampai asin sehingga cocok untuk budidaya ikan kakap putih, bawal bintang, kerapu macan ikan merah.

Aktivitas budidaya ikan ekonomis tinggi seperti ikan kerapu cantang, bawal bintang dan kakap putih dengan sistem dan teknologi (sistek) KJA, telah berlangsung sukses selama lebih dari 5 tahun di Kampung Madong. Aktivitas penangkapan gonggong ramah lingkungan, sesuai kearifan lokal yaitu, tidak boleh menggunakan pukat telah berjalan belasan tahun sehingga ketersediaan sumberdaya siput gonggong masih terjaga.

Aktivitas-aktivitas perikanan yang telah berlangsung dan didukung dengan potensi dan kondisi biofisik dan ekologi Kampung Madong ini, maka layak dijual dan dianjurkan, untuk dijadikan sebagai Kawasan Minawisata Bahari.

Bentuk minawisata bahari yang dapat ditawarkan adalah, minawisata bahari pembesaran ikan dan pemancingan. Kedua, minawisata bahari penangkapan siput gonggong dan jelajah padang lamun.

Ketiga, eduwisata jelajah *mangrove* dengan *speedboat*, wisata bahari jelajah dengan menggunakan sampan kano dan kayak. Lalu, wisata kuliner makanan dan minuman halal khas laut dan produk olahan ikan (kerupuk, minyak gamat) dan terakhir penyediaan jasa *home stay* khas Kampung Madong. Adapun infrastruktur, sarana prasarana dan SDM yang harus disiapkan, dalam program pengembangan kampung ikan ini,

di antaranya dukungan serta peran aktif masyarakat yang ada di Kampung Madong.

Selain itu, perlu adanya bantuan teknis dan non teknis dari pemerintah daerah, seperti sarana prasarana produksi KJA dan rumah jaga. Dermaga penumpang dan shelter-nya. Penambat speed boat, sampan kano dan kayak untuk aktivitas eduwisata bahari jelajah *mangrove*, serta pembangunan serta perbaikan jalan menuju lokasi.

Di samping itu, diperlukan pengadaan rambu-rambu navigasi alur kapal di sepanjang Teluk Madong, dan pengaturan jadwal pelayaran. Selain itu, pembangunan MCK yang bersih dan asri di rumah-rumah sepanjang lokasi tepi laut, terutama yang dijadikan *home stay*, berikut penyediaan air bersih di rumah *home stay* tersebut.

Selanjutnya, diperlukan untuk bantuan non teknis berupa pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas personal SDM. Seperti pelatihan teknik pengemasan produk, pemasaran produk secara digital, pembukuan dan neraca laba rugi secara digital dengan *smart phone*, HACCP dan lain yang terkait.

Khusus untuk penataan atau pembangunan *home stay*, harus berbasis pada rumah penduduk Kampung Madong yang sudah ada.

Tinggal yang perlu dilakukan, memperindah dan membuat *home stay* tersebut menjadi layak, nyaman, asri dan aman untuk ditempati dengan menyiapkan sarana seperti yang dikemukakan di atas.

Peran serta dari pelbagai instansi pemerintah seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan instansi lainnya sangat diperlukan.

Muara realisasi bantuan pemerintah Kota Tanjungpinang adalah political will, komitmen serta kesungguhan Wali Kota mengalokasikan anggaran dan mengawal pelaksanaannya. Bagaimana dengan peran kita warga Tanjungpinang? Mari semua berperan serta aktif dan positif.

Para akademisi dan praktisi perikanan, perekonomian, perdagangan, pariwisata, sosial dan kalangan lain ditunggu partisipasinya.

Para mahasiswa, terutama kaum milenial dapat mengadakan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Akhirnya, mari kita tunggu tindak lanjut realisasi program Kampung Ikan dan Minawisata Bahari Kampung Madong. Semoga terwujud. Aamiin. (*)

Gelap Moral Koruptor



Oleh:
UMBUR T.W. PARIANGU

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Retretan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah sungguh membuat miris. Pada Selasa (18/1) KPK meng-OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Ia tersandung kasus suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (*Jawa Pos*, 20/1).

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkena operasi tangkap tangan oleh KPK di Bekasi, Jawa Barat (5/1), terkait kasus pembebasan lahan dan lelang jabatan di lingkungan Kota Bekasi, Jawa Barat. Hanya berselang seminggu (Rabu, 12/1) giliran Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Dia ditangkap KPK terkait suap pengadaan barang dan jasa senilai Rp 112 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan Rp 9,9 miliar.

Memang sungguh miris. OTT kepala daerah itu terjadi di saat rakyat sedang berjuang keluar dari "sakratulmaut" ekonomi akibat pandemi. Mereka seolah sudah gelap moral dan hilang empati. Jadi, jangan tanya soal tanggung jawab moral mereka dalam mengurus dan melayani rakyatnya. Kalau Tuhan saja mereka berani khianati lewat pengkhianatan sumpah jabatannya, bagaimana dengan rakyat yang kedaulatannya bisa dengan mudah "dibeli" di pasar-pasar gelap demokrasi melalui transaksi elektoral?

Melemah

Tak heran, profil antikorupsi negara ini seakan melemah dari waktu ke waktu di

tengah pekik "perang badar" Presiden Jokowi terhadap praktik ganas korupsi. Berdasar data indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara G20, Indonesia masuk negara terkorup dengan skor 37 pada skala 0-100, turun tiga poin dari skor sebelumnya. Rusia menjadi negara G20 dengan indeks terendah (30) alias sangat korup. Sedangkan Jerman menjadi negara dengan IPK tertinggi (80) atau nyaris bersih dari korupsi. Di level nasional, indeks perilaku antikorupsi (IPAK) Indonesia pada 2021 sebesar 3,88 pada skala 0-5. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2020, yakni 3,84 (BPS, 2021). Sekalipun demikian, capaian ini belum memenuhi target RPJMN, yakni 4,00.

Itu berarti persepsi masyarakat terhadap antikorupsi masih mudah diguncangkan oleh pragmatisme yang kian akut. Contoh sederhanya, asumsi bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin sedikit peluang untuk korupsi ternyata tak akurat. Lihat saja, perguruan tinggi yang diharapkan sebagai lahan sakral menyemai pemimpin berkarakter unggul pun justru ikut terjebak dalam lumpur korupsi. Sebanyak 86 persen koruptor justru berasal dari perguruan tinggi yang tersebar di berbagai jabatan penting dengan gelar mentereng didominasi master. Lalu disusul sarjana dan doktor.

Harus diakui, fenomena tersebut tak bisa lepas dari bangunan pendidikan nasional yang selama ini terkungkung oleh kontrol subjektif-administratif. Kondisi itu memberikan keleluasaan intensi bagi

seseorang untuk mulai merasionalisasi cara-cara manipulatif sejak dini di lingkungan pendidikan. Sehingga aspek-aspek moral substantif dengan mudah dikalahkan oleh pragmatisme memperoleh gelar akademik, kekayaan, popularitas, dan kehormatan sosial.

Nalar pragmatisme dan syahwat kuasa yang menyuburkan perilaku korup para elite dan penyelenggara negara selalu berkelindan dengan orientasi kaum memonopoli dan mengendalikan hak-hak dan barang publik. Dalam politik kapitalis, uang adalah sentra kuasa dan kebijakan. Karena itulah, menurut Jeffrey Winters, uang tidak bisa didemokratisasikan. Uang sebagai basis perilaku politik hanya akan eksis di ruang-ruang konspirasi elitis yang menjegal nilai-nilai demokrasi.

Adalah C.B. Macpherson (1962) pencetus teori individualisme posesif. Itu adalah salah satu teori populer -meminjam diskusi John Locke tentang kepemilikan pribadi dalam *Second Treatise of Government*- yang disebut-sebut memfasilitasi suburnya kapitalisme, membenarkan n yang dikatakan kitab suci bahwa Tuhan telah memberikan bumi kepada seluruh umat manusia. Setiap orang bisa memisahnya dari miliknya bersama lewat usaha atau kerja pada bagian tersebut.

Masalahnya, bagaimana cara membatasi kepemilikan tersebut supaya tidak terjadi penguasaan tanpa batas? Jawabannya adalah pengenalan akan uang sebagai alat tukar. Tapi, justru di titik itulah para pengkritik Macpherson membangun re-

sistansi atas dalilnya. Menurut mereka, kata "posesif" pada akhirnya dimaknai sebagai hak "milik" (tanpa imperatif moral dan etis) ketimbang "kepemilikan" (memiliki sesuatu secara sepatutnya, dengan cara yang benar).

Rakyat Bersatu

Para elite penyelenggara negara di jantung kekuasaan yang dihadirkan untuk memproduksi kebijakan dan keadilan bagi kesejahteraan rakyat justru berlomba-lomba menafsirkan sekaligus memperlakukan jabatan dengan semua privilege dan regulasinya secara "posesif". Semua itu dilakukan sebagai sarana untuk mengakumulasi kekayaan haram.

Lord Acton yakin, kekuasaan cenderung korup (*power tends to corrupt*). Namun, menurut Hannah Arendt, selama yang lemah tidak bersatu melawan kekuatan korup, mustahil ada kekuatan yang korup. Singkatnya, kekuasaan tak perlu korup jika tak ada persatuan kaum lemah untuk menantangnya (*Arendt, 1989: 200*).

Poinnya adalah eksistensi dan internalisasi korupsi terkait kesadaran kolektif untuk mengeliminasi secara radikal. Kita harus senantiasa mencurigai atau tidak boleh terus mengobrol kekaguman destruktif terhadap para elite/pejabat hanya karena terlihat lebih kaya atau santun dalam berbahasa. Karena di dalam privilege tersebut, kerap tersimpan potensi korupsi seperti banyak testimoni miris pasca-operasi tangkap tangan KPK terhadap para kepala daerah selama ini. (*)

Batam Pos

www.batampos.com.id | redaksi@batampos.com.id | http://twitter.com/batampos

Diterbitkan Oleh: PT Sijori Interbitana Pers
Terbit sejak tanggal 10 Agustus 1998

Perintis : Rida K Liamsi
Komisaris Utama : Suhendro Boroma
Komisaris : Ahmad Dardiri, Margana Nainggolan
Direktur Utama : Socrates
Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab : Muhammad Iqbal
Wakil Pemimpin Redaksi Koran : R Yusuf Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi Online : Tunggal Manurung
Redaktur Pelaksana : Muhammad Nur, Muhammad Tahang
Dewan Redaksi : Socrates (Ketua), Muhammad Iqbal, Yusuf Hidayat, Muhammad Nur, Tunggal Manurung
Corporate Lawyer : DR Ampuan Situmeang SH, MH Andi Syafruddin, SH, MH

DIVISI PRODUKSI

Departemen Redaksi

Sekretaris Redaksi: Umy Kalsum. Redaktur: Gustia Benny, Putut Aryotejo, Jamil Qasim, Anwar Saleh Harahap, Andriani Susilawati, Ratna Irtatik, Yunus Suchari, Agnes Dhamayanti, Suprizal Tanjung, Ahmadi Sultan, Chahaya Simanjuntak, Ryan Agung Prambudi, Galih Adi Saputro, Alfian Lumban Gaol. **Liputan Batam:** Yashinta, Rifki Setiawan Lubis, Rengga Yulandra, Fiska Juanda, Eusebius Sara, Yofie Yuhendri, YultaviaEggy Idrriansyah, Abdul Azis Maulana. **Koordinator Foto:** Iman Wachyudi, **Fotografer:** Cecep Maulana, Dalil Harahap, **Liputan Tanjungpinang & Bintan:** Jailani, Yusnadi Nazar, Peri Irawan, Slamet Nofasusanto, **Liputan Karimun:** Ichwanul Fazmi, Try Haryono, Imam Soekarno. **Pracetak, Perwajahan dan Artistik:** Sutrijanto (Penanggungjawab) Kamaruzaman, Tilbertus Sile Marapul, Gofmin Afrizal, Hairunas, Mahfut Ashari, Pranataka, Amron Abadi Simbolon, Welli Hendra.

● **Departemen Digital & Audiovisual, Manajer:** Agustriano. **Penanggungjawab Konten Audiovisual:** Imanuel Sebayang. **Grafis dan Media Sosial:** Ali Sadikin.

● **DIVISI USAHA**

● **Departemen Iklan Koran & Online, Manajer :** Levina Desianty, **Penanggungjawab Omsel & AE:** Mela Nova Riantari. **Penanggungjawab Desain Iklan :** Diki.

● **Departemen Pemasaran, Manajer:** Herman Mangundap. **Asisten Manajer Pemasaran:** Johandri. **Asisten Manajer Adm dan Puitang:** Ismanto. **Asisten Manajer Distribusi dan Langganan :** Gudson Nainggolan.

● **Departemen Keuangan, Manajer:** Roslina Yanti. **Manajer Keuangan Online:** Yusrirdawati. **Asisten Manajer Adm dan Fiskal:** Masyuni Simbolon. **Asisten Manajer Adm dan Puitang Iklan:** Dewi Anita.

● **Departemen HRGA, Manajer:** Elmi Gusti. **Asisten Manajer:** Linglon BPL Tungkup. **Asisten Manajer IT:** Halasan Sinaga.

● **Perwakilan Tanjungpinang, Kepala:** Cipi Clandina. **Penanggungjawab Umum dan Keuangan:** Jumi. **Perwakilan Karimun, Kepala:** Sandi Pramოსito. **Perwakilan Jakarta, Manajer Area:** Hosni Masidi. **Biro Natuna:** Sholeh Aryanto. **Biro Lingga:** Maliki.

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

TARIF IKLAN :

- Iklan Umum / Display / BW Rp.55.000.-/mm kolom
- Iklan Umum / Display / FC Rp. 75.000.-/mm kolom
- Iklan Umum Selamat Rp. 10.000.-/mm kolom
- Iklan Dukacita Rp. 7.500.-/mm kolom
- Iklan Hiburan / Film Rp. 10.000.-/mm kolom
- Iklan Halaman Muka (BW) Rp. 75.000.-/mm kolom
- Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 120.000.-/mm kolom

● **Pernyataan halaman dikenakan tambahan biaya 25% dari harga nett.**

ALAMAT :

Redaksi, Pemasaran, Iklan dan ED: Gedung Graha Pena Lantai 2, Telepon: (0778) 460000 (hunting), Fax: (0778) 462162 dan (0778) 465111. **Batam Center, Batam:** Perwakilan Pekanbaru: Jalan Raya Pekanbaru-Banjarbaru KM 10,5 Telepon (0761) 64634 Fax: (0761) 64638. **Perwakilan Jakarta:** Gedung Indopos Lantai 6 Jalan Kebayoran 12 Jakarta Selatan, Telepon (021) 5369590 - 5333046. **Perwakilan Tanjungpinang:** Jalan Pramuca 3, Telepon (0771) 27714, 27715. **Perwakilan Tanjungbali Karimun:** Jalan A. Yani, Sungsai Lakam, Telepon (0777) 323686, Fax: (0777) 323685. **Rekening PT Sijori Interbitana Pers, NISP:** 090.010.011377, Bank Riau Kepri Cabang Batam: 106-08-04456. **Dicetak pada:** PT Sijori Interbitana Press. **Alamat:** Komplek Graha Pena Batam, Batam Center, Batam. Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan.

- **Wartawan Batam Pos** dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita.
- **Wartawan Batam Pos** dibekali dengan kartu pers ketika menjalankan tugas.
- **Jika ada kejangalan, baik tentang identitas wartawan maupun tentang lindungan wartawan** dapat menghubungi Sekretariat Redaksi Batam Pos.